

Media Cetak	Ujungpandang Ekspres
Tanggal	Kamis 21 November 2024
Wilayah	Kota Makassar



Tingkatkan PAD Melalui Digitalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi

Dari Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar

Tingkatkan PAD Melalui Digitalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi

MAKASSAR, UPEKS-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, atas pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Makassar terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (20/11/2024).



Dalam tanggapannya, Andi Arwin memberikan penjelasan komprehensif mengenai beberapa isu yang menjadi perhatian DPRD, khususnya terkait realisasi retribusi daerah yang selalu di bawah target yang ditetapkan. Ia menjelaskan, Pemkot telah mengevaluasi capaian realisasi retribusi tahun-tahun sebelumnya serta melakukan analisis terhadap potensi dan kondisi teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola retribusi.

Andi Arwin menegaskan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor

1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi momentum penting untuk menyesuaikan jenis, tarif, kewenangan dan target retribusi. Diharapkan, dengan penerapan regulasi baru ini, realisasi retribusi daerah tahun 2025 akan lebih optimal.

Guna mengurangi kebocoran penerimaan, lanjut dia, Pemkot Makassar bekerjasama DPRD telah mendorong digitalisasi penerimaan retribusi melalui implementasi pembayaran non-tunai berbasis QRIS dan Virtual Account.

PARIPURNA. DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, atas pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Makassar terhadap Ranperda APBD 2025, Rabu (20/11/2024)

"Diharapkan dengan pengawasan dan sinergi yang baik dengan legislatif, dapat mendorong SKPD pengelola retribusi dalam penerapan digitalisasi," ujarnya.

Lebih lanjut, upaya untuk meningkatkan PAD juga telah dilakukan melalui penguatan regulasi dan pemanfaatan teknologi digital. Pemkot Makassar telah mengintegrasikan berbagai metode pem-

bayaran seperti QRIS, Virtual Account serta layanan melalui platform e-commerce seperti Gopay, ShopeePay, Tokopedia dan LinkAja ke dalam aplikasi Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi (PAKINTA).

Dalam mendukung kinerja SKPD, Pemkot Makassar juga mengalokasikan anggaran khusus pada APBD 2025 berupa tambahan penghasilan berdasarkan kriteria

objektif. Reward ini diberikan kepada SKPD yang berhasil mencapai target pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, kata Andi Arwin, diharapkan target pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi, dapat tercapai secara maksimal di tahun 2025. "Harapan kami pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar dan segera kita rampungkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemenuhan kepentingan masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama," ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Makassar, Supratman menegaskan, tanggapan yang dipaparkan Pjs Wali Kota Makassar akan menjadi bahan untuk dibawa pada pembahasan Ranperda APBD 2025 selanjutnya. "Nanti akan dilihat yang mana yang menjadi skala prioritas dan mana yang dianggap biasa saja," pungkasnya. (jir/rif)